



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2027



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta kebutuhan pendanaan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renja PD disusun berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2027.

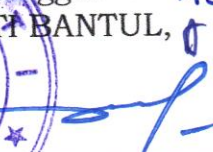
Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Sekretariat DPRD. Renja Perangkat Daerah tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun 2027 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2027. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Penyusunan rancangan,
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48);
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan

kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
2. evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2026 dikaitkan dengan pencapaian target kondisi akhir Renstra Tahun 2025-2029.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk:

1. mengetahui realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2025 dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2025,
2. memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026,

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	85 angka	85	84	98.82	84	98.82
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah							
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	15	5	5	100	20	80
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	18	6	6	100	24	80
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156	117	39	39	100	156	100
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	36	12	12	100	48	100
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	84	63	21	21	100	84	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		SKPD							
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160	120	40	40	100	160	100
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	21	7	7	100	28	100
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	6	2	2	100	8	100
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	8	6	2	2	100	8	100
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	36	12	12	100	48	100
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	36	12	12	100	48	100
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48	36	12	12	100	48	100
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Pemerintah Daerah							
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	36	12	12	100	48	100
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	36	12	12	100	48	100
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	36	12	12	100	48	100
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	36	12	12	100	48	100
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	12	4	4	100	16	100
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	164	123	41	41	100	164	100
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	20	20	100	20	100
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	6	6	6	100	6	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	360	270	45	45	100	315	87,5
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	20	12	4	4	100	16	80
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	225	135	45	27	60	252	72
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD							
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	52	28	12	12	100	40	76,92
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	90	84	88	87	98,86	87	96,66
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	25	18	6	6	100	22	88
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	45	27	9	9	100	36	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	24	14	5	5	100	19	79,17
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	22	12	5	5	100	17	77,27
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran							
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	40	24	8	8	100	32	80
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	80	48	16	16	100	64	80
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD							
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	25	15	6	6	100	21	84
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	164	45	42	1	2,4	46	28,04
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	384	274	96	72	75	346	90,1
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	528	264	132	132	100	396	75
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat							
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil	17	9	4	4	100	13	76,47

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021- 2026	Tingkat Capaian Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		Pelaksanaan Reses							
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD							
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5	3	1	1	100	4	80
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD							
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100	60	20	20	100	80	80
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	5	3	1	1	100	4	80
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	16	9	4	4	100	13	81,25
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	300	180	60	60	100	240	80

Sumber: Evaluasi Renja Setwan Kab. Bantul TW IV 2025, 2026

Tabel 2.2
Prakiraan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	94.77	92.39	92.55	92.55	100	92.39	97.50
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	82.20	81.60	82.00	82.00	100	81.60	99,27
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah							
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	5	5	5	100	10	40
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	6	6	6	100	12	40
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	41	39	39	100	39	100
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	12	12	12	100	24	40

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	105	21	21	21	100	42	40
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200	40	40	40	100	80	40
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	7	7	7	100	14	40
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	10	2	2	2	100	4	40
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	12	12	12	100	24	40
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	12	12	100	24	40
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	60	12	12	12	100	24	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
		pada SKPD							
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	24	40
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	24	40
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	12	12	12	100	24	40
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	4	4	100	4	100
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41	41	41	41	100	41	100
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	6	6	6	100	6	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45	45	45	45	100	45	100
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	25	0	5	5	100	5	20
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	225	45	45	45	100	45	20
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase capaian pembahasan produk hukum Fungsi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran	100	155.56	100	100	100	100	100
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	30	6	6	6	100	12	40
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	45	9	9	9	100	18	40
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	25	4	5	5	100	9	36

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	25	5	5	5	100	10	40
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran							
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	40	8	8	8	100	16	40
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	80	16	16	16	100	32	40
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD							
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	30	6	6	6	100	12	40
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	210	1	42	42	100	1	2.4
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	480	72	96	96	100	168	35
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	660	132	132	132	100	264	40
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat							
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	20	3	4	4	100	7	35
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD							
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5	1	1	1	100	2	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2026			Realisasi Renstra Tahun 2025-2029	Tingkat Capaian Renstra Tahun 2025-2029 (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)=(5)+(7)	(10)=(9)/(4)
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD							
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100	20	20	20	100	40	40
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	5	1	1	1	100	2	40
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	20	4	4	4	100	8	40
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	300	60	60	60	100	120	40

Sumber: Setwan Kab. Bantul, 2026 (diolah)

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 pada Tabel 2.1 dan prakiraan capaian Tahun 2026 pada Tabel 2.2. dapat dijelaskan faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja meliputi:
 - a. Kompleksitas pembahasan substansi produk hukum.
Beberapa produk hukum memerlukan pembahasan yang mendalam dan koordinasi lintas perangkat daerah, sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar;
 - b. Proses pembahasan produk hukum memerlukan dukungan data, kajian, dan koordinasi dengan pihak lain, yang dalam beberapa kondisi dapat mempengaruhi kecepatan proses fasilitasi.
2. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja meliputi:
 - a. Optimalnya dukungan administratif dan fasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
Sekretariat DPRD telah melaksanakan tugas fasilitasi secara optimal, mulai dari penyiapan bahan rapat, penyusunan risalah, koordinasi dengan alat kelengkapan DPRD, hingga fasilitasi tenaga ahli, sehingga proses pembentukan produk hukum dapat berjalan dengan lancar.
 - b. Tingginya komitmen Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi.
Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah dan produk hukum lainnya turut mendorong peningkatan jumlah produk hukum yang diterbitkan.
 - c. Koordinasi yang efektif antara Sekretariat DPRD dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait.
Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah pemrakarsa, tenaga ahli, serta pihak terkait lainnya mendukung kelancaran proses pembahasan produk hukum.
 - d. Kompetensi dan pengalaman SDM Sekretariat DPRD yang memadai.

SDM yang memiliki pemahaman terhadap mekanisme pembentukan produk hukum serta prosedur administrasi persidangan mampu memberikan dukungan yang optimal kepada DPRD.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut maka langkah strategis pada Tahun 2027 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, khususnya dengan anggota Dewan terkait rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, dan efektif;
2. Lebih mengoptimalkan fungsi Asdeski (Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia) sebagai wahana komunikasi antar Sekretariat DPRD seluruh Indonesia.
3. Meningkatkan kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan terhadap tugas dan kewajiban sehingga semua program kegiatan pada tahun mendatang dapat terlaksana sesuai target;
4. Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi penganggaran setiap kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul agar capaian kinerja dan keuangan maksimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah, meliputi:

- Penilaian capaian IKU Tahun 2025 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- Penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				Target		
			2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026								
	a. Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen (%)	92.31	91.67	100	109.1	91	80	
	b. Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD.	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	
II.	IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029								
	a. Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
	b. Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	Indeks	92.09	93.96	94.54	94.53	94.72	94.91	95.01

Sumber: Setwan Kab. Bantul, 2026 (diolah)

Sesuai pencapaian IKU Sekretariat DPRD Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

- Pada Tahun 2025 ditetapkan 2 jenis IKU:
 - IKU sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - IKU sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- Indikator (IKU) yang tidak dapat memenuhi target adalah Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Jadwal rapat dan pembahasan anggota dewan sering berubah-ubah menyesuaikan jadwal anggota dewan;
- Keterlambatan penyampaian sebagian materi Naskah

Akademik dan kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dari pihak pengusul, sehingga berdampak pada mundurnya jadwal pembahasan Raperda di DPRD.

- c. Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menyesuaikan perubahan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat.

3. Indikator (IKU) yang dapat memenuhi target adalah persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. kinerja yang baik dari Sekretariat DPRD dari mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi setiap program dan kegiatan;
- b. komitmen seluruh pegawai Sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan kegiatan yang telah tersusun;
- c. koordinasi dan kerja sama yang baik dengan internal maupun eksternal Sekretariat DPRD.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Sekretariat DPRD Tahun 2025 tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2027 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Capaian IKU tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya selalu melebihi target yang ditetapkan. Oleh karenanya pada tahun 2027, kinerja yang baik perlu dipertahankan, terutama dari sisi fasilitasi kegiatan kedewanan.
2. Berdasarkan evaluasi tahun 2025, terdapat deviasi yang cukup tinggi antara target dan realisasi keuangan, maka pada tahun 2027 perlu peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi anggaran sehingga capaian kinerja keuangan dapat optimal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pelayanan administrasi, keuangan, dan dukungan terhadap tugas serta fungsi DPRD. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen yang tinggi dari ASN Sekretariat DPRD	Dinamisnya perubahan jadwal, proses administrasi dan faktor teknis dalam pelaksanaan kegiatan
Dukungan sarana dan prasarana yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Terbatasnya ASN Sekretariat DPRD dengan sertifikasi penyusunan perancang perundang-undangan
Koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan rancangan perundang-undangan	

Sumber: Setwan Kab. Bantul, 2026

Tabel 2.5
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Peluang	Tantangan
Perkembangan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam layanan kepada DPRD dan masyarakat.	Dicabutnya Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional
Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD	Kemajuan digital menuntut ASN harus mengikuti perkembangan digitalisasi untuk mempercepat kinerja pelayanan kepada masyarakat
Kesempatan untuk memanfaatkan pelatihan dan bimbingan teknis dari lembaga terkait, seperti Asosiasi Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI)	Makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme anggota dewan maupun aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sumber: Setwan Kab. Bantul, 2026

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka strategi pada Tahun 2027 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul untuk meningkatkan

kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program dan kegiatan, terutama menyikapi dinamisnya kegiatan anggota dewan.

2. Penyusunan standar kinerja yang realistis dan terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
3. Efisiensi penggunaan anggaran, terkait dengan program Pemerintah Daerah untuk mengurangi defisit anggaran sehingga harus diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
4. Optimalisasi pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.05	36.082.971.160	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.05	34.934.735.483,93	
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	93.00				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	93.00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 persen	56.100.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 persen	49.980.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	28.050.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	24.990.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	28.050.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	24.990.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	85 persen	6.630.124.101	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	85 persen	6.460.915.795	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bln	6.470.774.101	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bln	6.302.325.795,93	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	131.300.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	133.600.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	21 Laporan	28.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	21 Laporan	24.990.000	

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Triwulanan/ Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semesteran SKPD			Triwulanan/ Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 persen	168.126.776	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 persen	195.824.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	168.126.776	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	195.824.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 persen	1.101.532.910	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 persen	1.143.607.480	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	780.243.910	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	762.638.480	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 dokumen	70.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 dokumen	64.800.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	116.554.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	126.735.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	258.169.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan	12 Dokumen	8.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan	12 Dokumen	8.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Arsip Dinamis pada SKPD					Arsip Dinamis pada SKPD			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 persen	1.642.733.920	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 persen	1.624.903.796	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	15.301.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	21.587.200	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118.876.255	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140.691.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.508.556.165	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.462.625.196	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	946.369.523	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 persen	869.656.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	230.785.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	317.742.150	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	508.484.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	451.074.150	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana	6 unit	207.100.023	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana	6 unit	100.839.700	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	85 persen	25.537.983.930	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	85 persen	24.589.848.412	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 orang/bulan	25.028.933.628	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 orang/bulan	23.955.640.912	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 paket	440.193.552	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 paket	574.357.500	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	68.856.750	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	59.850.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Bantul	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran	100 %	15.616.432.065	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab. Bantul	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran	100 %	16.431.446.000	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	85 persen	2.928.479.891	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	85 persen	3.705.513.500	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 dokumen	1.377.000.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 dokumen	1.434.275.000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	1.303.260.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	2.085.604.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	107.110.500	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	77.090.000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen	141.109.391	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen	108.544.500	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	85 persen	1.666.500.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	85 persen	2.423.827.000	
	Pembahasan APBD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 dokumen	1.666.500.000	Pembahasan APBD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 dokumen	2.423.827.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	85 persen	2.126.050.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	85 persen	2.480.096.000	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 dokumen	2.126.050.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 dokumen	2.480.096.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	85 persen	3.717.506.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	85 persen	3.155.053.000	
	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	2.110.900.000	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	2.138.111.000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Bantul	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42 orang	315.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Bantul	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42 orang	20.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 orang	255.750.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 orang	254.500.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	132 dokumen	1.035.856.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	132 dokumen	742.442.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Hubungan Masyarakat					Hubungan Masyarakat			
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	85 persen	1.774.196.174	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	85 persen	750.150.000	
	Pelaksanaan Reses	Kab. Bantul	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	4 dokumen	1.774.196.174	Pelaksanaan Reses	Kab. Bantul	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	750.150.000	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	85 persen	282.800.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	85 persen	236.717.000	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 laporan	282.800.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 laporan	236.717.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	85 persen	3.120.900.000	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	85 persen	3.680.089.500	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 dokumen	2.131.100.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 dokumen	2.252.319.000	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	136.350.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	240.394.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	606.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	735.418.500	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 dokumen	247.450.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 dokumen	451.958.000	

Sumber: Setwan Kab. Bantul, 2026 (diolah)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2027 serta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

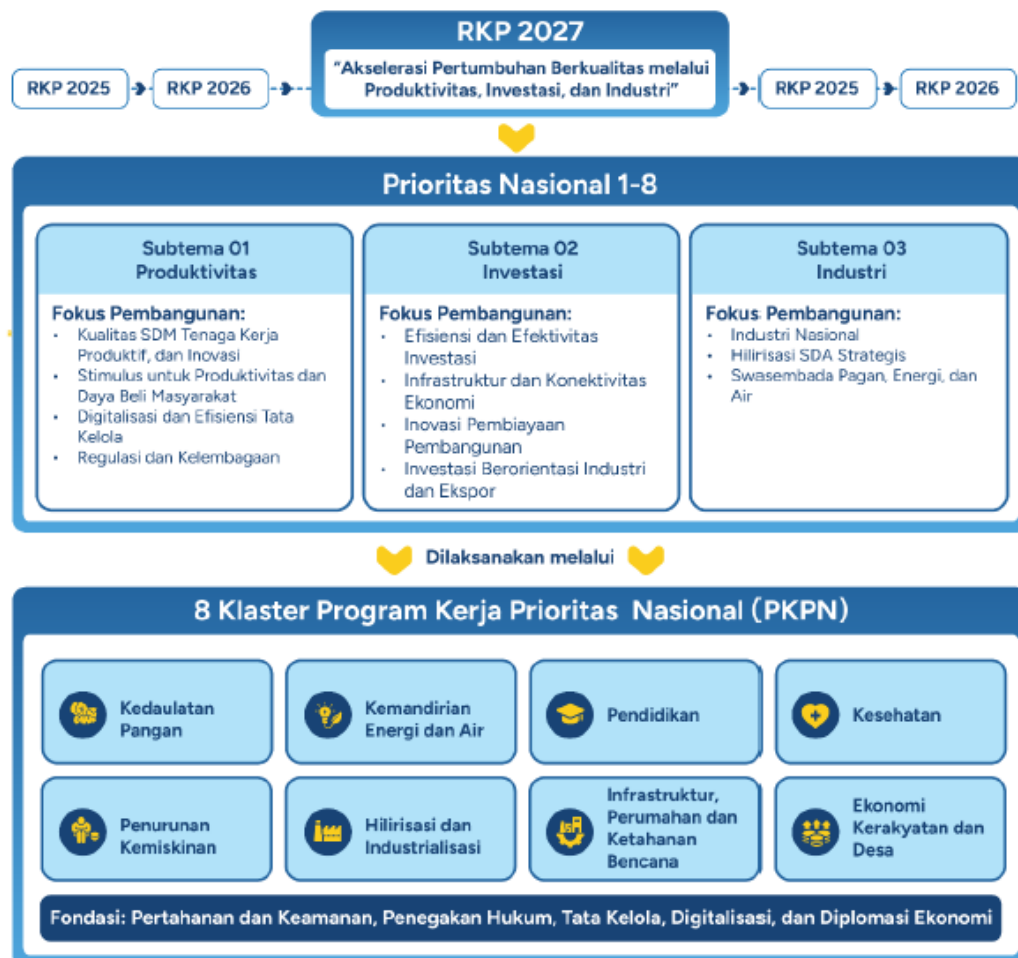
Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2027 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Tema Pembangunan Nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”** yang dilaksanakan melalui 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan fondasi Pertahanan dan Keamanan, Penegakan Hukum, Tata Kelola, Digitalisasi, dan Diplomasi Ekonomi.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Tema RKP 2027

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2027 tersebut, maka langkah strategis yang akan ditempuh oleh Sekretariat DPRD Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dukungan administrasi, keuangan, dan persidangan bagi DPRD agar pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berjalan efektif;
2. Memperkuat penyusunan produk hukum daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui digitalisasi layanan kesekretariatan, persidangan, dan dokumentasi;
4. Meningkatkan kompetensi aparatur Setwan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi;
5. Memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan layanan kesekretariatan;
6. Meningkatkan fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat serta penguatan komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat;
7. Mengoptimalkan pengelolaan kinerja, pengendalian, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat DPRD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bantul 2027 adalah **"Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata didukung SDM Berkualitas"** dengan Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2027 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi 2025	Perkiraan realisasi 2026	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya penerbitan produk hukum		Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Persen	100	100	100
		Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	Indeks	94,53	94,91	95,01

Sumber: Renstra Setwan Kab. Bantul 2025-2029, 2026 (diolah)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2027 yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Bantul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						48.397.124.983,93							51.699.403.225,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						48.397.124.983,93							51.699.403.225,00	
	4,02	SEKRETARIAT DPRD						48.397.124.983,93							51.699.403.225,00	
1,	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						33.802.036.983,93							36.082.971.160,00	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan						33.791.411.983,93							36.026.871.160,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94.77 Indeks		92.55 Indeks	93.00 Indeks	33.791.411.983,93						93.50 Indeks	36.026.871.160,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.20 Nilai		82.00 Nilai	82.05 Nilai	33.791.411.983,93						82.10 Nilai	36.026.871.160,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.250.000,00					Setwan Kabupaten Bantul		56.100.000,00	
		Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.250.000,00					Setwan Kabupaten Bantul		56.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10.625.000,00						5 Dokumen	28.050.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	10.625.000,00						6 Laporan	28.050.000,00	
	4.02.01.2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.625.000,00							28.050.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10.625.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Dokumen	28.050.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.625.000,00							28.050.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	10.625.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		6 Laporan	28.050.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.448.675.795,93					Setwan Kabupaten Bantul		6.630.124.101,00	
		Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.448.675.795,93					Setwan Kabupaten Bantul		6.630.124.101,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	133.600.000,00						12 Dokumen	131.300.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	21 Laporan		21 Laporan	21 Laporan	12.750.000,00						21 Laporan	28.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan		39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	6.302.325.795,93						39 Orang/bulan	6.470.774.101,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.302.325.795,93							6.470.774.101,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan		39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	6.302.325.795,93	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		39 Orang/bulan	6.470.774.101,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						133.600.000,00							131.300.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	133.600.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	131.300.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						12.750.000,00							28.050.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	21 Laporan		21 Laporan	21 Laporan	12.750.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		21 Laporan	28.050.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						189.324.000,00					Setwan Kabupaten Bantul		168.126.776,00	
		Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						189.324.000,00					Setwan Kabupaten Bantul		168.126.776,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang		40 Orang	40 Orang	189.324.000,00						40 Orang	168.126.776,00	
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						189.324.000,00							168.126.776,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang		40 Orang	40 Orang	189.324.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		40 Orang	168.126.776,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						732.011.080,00					Setwan Kabupaten Bantul		1.101.532.910,00	
		Terlaksannanya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						732.011.080,00					Setwan Kabupaten Bantul		1.101.532.910,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	64.800.000,00						2 Dokumen	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Undangan yang Disediakan													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00						12 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	116.554.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	248.669.000,00						12 Laporan	126.735.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	363.542.080,00						7 Paket	780.243.910,00	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						363.542.080,00							780.243.910,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	363.542.080,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		7 Paket	780.243.910,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						64.800.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	64.800.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		2 Dokumen	70.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00							116.554.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	116.554.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						248.669.000,00							126.735.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	248.669.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Laporan	126.735.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		12 Dokumen	8.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.591.121.396,00					Setwan Kabupaten Bantul		1.642.733.920,00	
		Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.591.121.396,00					Setwan Kabupaten Bantul		1.642.733.920,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.587.200,00						12 Laporan	15.301.500,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kendaraan Dinas Jabatan														
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	317.742.150,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Unit	230.785.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						383.438.950,00							508.484.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit		41 Unit	41 Unit	383.438.950,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		41 Unit	508.484.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09.0 010	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						99.397.700,00							207.100.023,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	99.397.700,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		6 Unit	207.100.023,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						24.019.075.912,00					Anggota DPRD		25.537.983.930,00	
		Terlaksananya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						24.019.075.912,00					Anggota DPRD		25.537.983.930,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bul an		45 Orang/Bula n	45 Orang/Bul an	23.955.640.912,00						45 Orang/B ulan	25.028.933.628,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	25.270.000,00						45 Orang	68.856.750,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	38.165.000,00						5 Paket	440.193.552,00	
	4.02.01.2.15.0 001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						23.955.640.912,00							25.028.933.628,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bul an		45 Orang/Bula n	45 Orang/Bul an	23.955.640.912,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		45 Orang/B ulan	25.028.933.628,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15.0 002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						38.165.000,00							440.193.552,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	38.165.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Paket	440.193.552,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15.0 003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						25.270.000,00							68.856.750,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	25.270.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan		45 Orang	68.856.750,00	Sekretariat Dewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kecamatan Bantul Desa Bantul 1		erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan				Perwakilan Rakyat Daerah
2,	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						14.595.088.000,00							15.616.432.065,00	
		Meningkatnya Capaian Fasilitasi Pembahasan Produk Hukum DPRD						14.595.088.000,00							15.616.432.065,00	
			999.Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi	100 %		100 %	100 %	14.595.088.000,00						100 %	15.616.432.065,00	
			999.Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran	100 %		100 %	100 %	14.595.088.000,00						100 %	15.616.432.065,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						3.655.698.500,00					Kabupaten Bantul		2.928.479.891,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						3.655.698.500,00					Kabupaten Bantul		2.928.479.891,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	2.073.904.000,00						9 Dokumen	1.303.260.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1.400.160.000,00						6 Dokumen	1.377.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	105.544.500,00						5 Dokumen	141.109.391,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	76.090.000,00						5 Dokumen	107.110.500,00	
	4.02.02.2.01.0 001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						1.400.160.000,00							1.377.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	5 Dokumen	1.400.160.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		6 Dokumen	1.377.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01.0 002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						2.073.904.000,00							1.303.260.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	2.073.904.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		9 Dokumen	1.303.260.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01.0 003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						76.090.000,00							107.110.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	76.090.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi,	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Dokumen	107.110.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Desa Bantul 1		narkoba, judi, dan pe nyeludupan.					
	4.02.02.2.01.0 004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik						105.544.500,00							141.109.391,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	105.544.500,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5 Dokumen	141.109.391,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						1.978.057.000,00					Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		1.666.500.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran						1.978.057.000,00					Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		1.666.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	1.978.057.000,00						8 Dokumen	1.666.500.000,00	
	4.02.02.2.02.0 003	Pembahasan APBD						1.978.057.000,00							1.666.500.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	1.978.057.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		8 Dokumen	1.666.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						1.956.355.000,00					Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		2.126.050.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						1.956.355.000,00					Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		2.126.050.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	1.956.355.000,00						16 Dokumen	2.126.050.000,00	
	4.02.02.2.03.0 007	Pengawasan Penggunaan Anggaran						1.956.355.000,00							2.126.050.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	1.956.355.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		16 Dokumen	2.126.050.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						3.115.203.000,00					Anggota DPRD		3.717.506.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD						3.115.203.000,00					Anggota DPRD		3.717.506.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.138.111.000,00						6 Dokumen	2.110.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	132 Dokumen		132 Dokumen	132 Dokumen	738.592.000,00						132 Dokumen	1.035.856.000,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42 Orang		42 Orang	42 Orang	20.000.000,00						42 Orang	315.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 Orang		96 Orang	96 Orang	218.500.000,00						96 Orang	255.750.000,00	
	4.02.02.2.04.0 002	Pendalaman Tugas DPRD						2.138.111.000,00							2.110.900.000,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.138.111.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan		6 Dokumen	2.110.900.000,00	Sekretariat Dewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									Kecamatan Bantul Desa Bantul 1		erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan				Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						20.000.000,00							315.000.000,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42 Orang		42 Orang	42 Orang	20.000.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		42 Orang	315.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						218.500.000,00							255.750.000,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 Orang		96 Orang	96 Orang	218.500.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		96 Orang	255.750.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						738.592.000,00							1.035.856.000,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	132 Dokumen		132 Dokumen	132 Dokumen	738.592.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		132 Dokumen	1.035.856.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						736.150.000,00					Anggota DPRD dan Masyarakat		1.774.196.174,00	
		Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						736.150.000,00					Anggota DPRD dan Masyarakat		1.774.196.174,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	736.150.000,00						4 Dokumen	1.774.196.174,00	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						736.150.000,00							1.774.196.174,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	736.150.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	1.774.196.174,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						234.592.000,00					Anggota DPRD		282.800.000,00	
		Terlaksananya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD						234.592.000,00					Anggota DPRD		282.800.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	234.592.000,00						1 Laporan	282.800.000,00	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						234.592.000,00							282.800.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	234.592.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	282.800.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						2.919.032.500,00					Anggota DPRD		3.120.900.000,00	
		Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD						2.919.032.500,00					Anggota DPRD		3.120.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	534.698.500,00						4 Dokumen	606.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF			
											NASIONAL	DAERAH						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	451.958.000,00						60 Dokumen	247.450.000,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	1.691.982.000,00						20 Dokumen	2.131.100.000,00			
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.394.000,00						1 Laporan	136.350.000,00			
	4.02.02.2.08.0 001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						1.691.982.000,00							2.131.100.000,00			
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	1.691.982.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		20 Dokumen	2.131.100.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
	4.02.02.2.08.0 002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						240.394.000,00							136.350.000,00			
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.394.000,00	Kab. Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		1 Laporan	136.350.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
	4.02.02.2.08.0 003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						534.698.500,00							606.000.000,00			
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	534.698.500,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		4 Dokumen	606.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
	4.02.02.2.08.0 004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						451.958.000,00							247.450.000,00			
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	451.958.000,00	Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kecamatan Bantul Desa Bantul 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	2. Mewujud kan transfor masi tata kelola peme rintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		60 Dokumen	247.450.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
	J U M L A H							48.397.124.983,93								51.699.403.225,00		

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2027. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RKPD Tahun 2027.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah pada Tahun 2027. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.


ANWAR NUR AHMUDIN, S.STP., M.Eng.
NIP. 197810051998101002